



LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

2022

ALAMAT

Jln. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618
Telp/Fax : (0526)2028432

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Gambaran Umum SKPD	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra1	15
B. Rencana Kerja	20
C. Indikator Kinerja	27
D. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Analisis Capaian Kinerja	39
C. Realisasi Anggaran	67
D. Analisis Kinerja Lainnya	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Upaya Perbaikan Kinerja	78

Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, 01 Februari 2023

Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S. Pd, MM

Pembina Tk. I / IVb

NIP.19670403 199403 1 015

Ringkasan Eksekutif



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai, yaitu dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan, 1

(satu) indikator yaitu Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” dengan capaian sasaran sebesar 100%. Dan Sasaran Kedua dengan 2 (dua) Indikator yaitu indikator pertama Rasio Tempat Ibadah mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” dengan capaian sasaran sebesar 94% dan Indikator kedua yaitu Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu dengan capaian 100% untuk Persentase Parpol yang Aktif dan predikat ‘Sangat Tinggi” dengan capaian 100% untuk Persentase Ormas yang Aktif.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum SKPD

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sasaran dari Reformasi Birokrasi. Dalam Good Governance dituntut manajemen berbasis kinerja yakni dari menetapkan tujuan, pengukuran, target dan mengaitkan tujuan dan sasaran serta adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing – masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan

suatu laporan yang dicapai instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2022.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana

evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

D. Gambaran Umum SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di

Daerah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

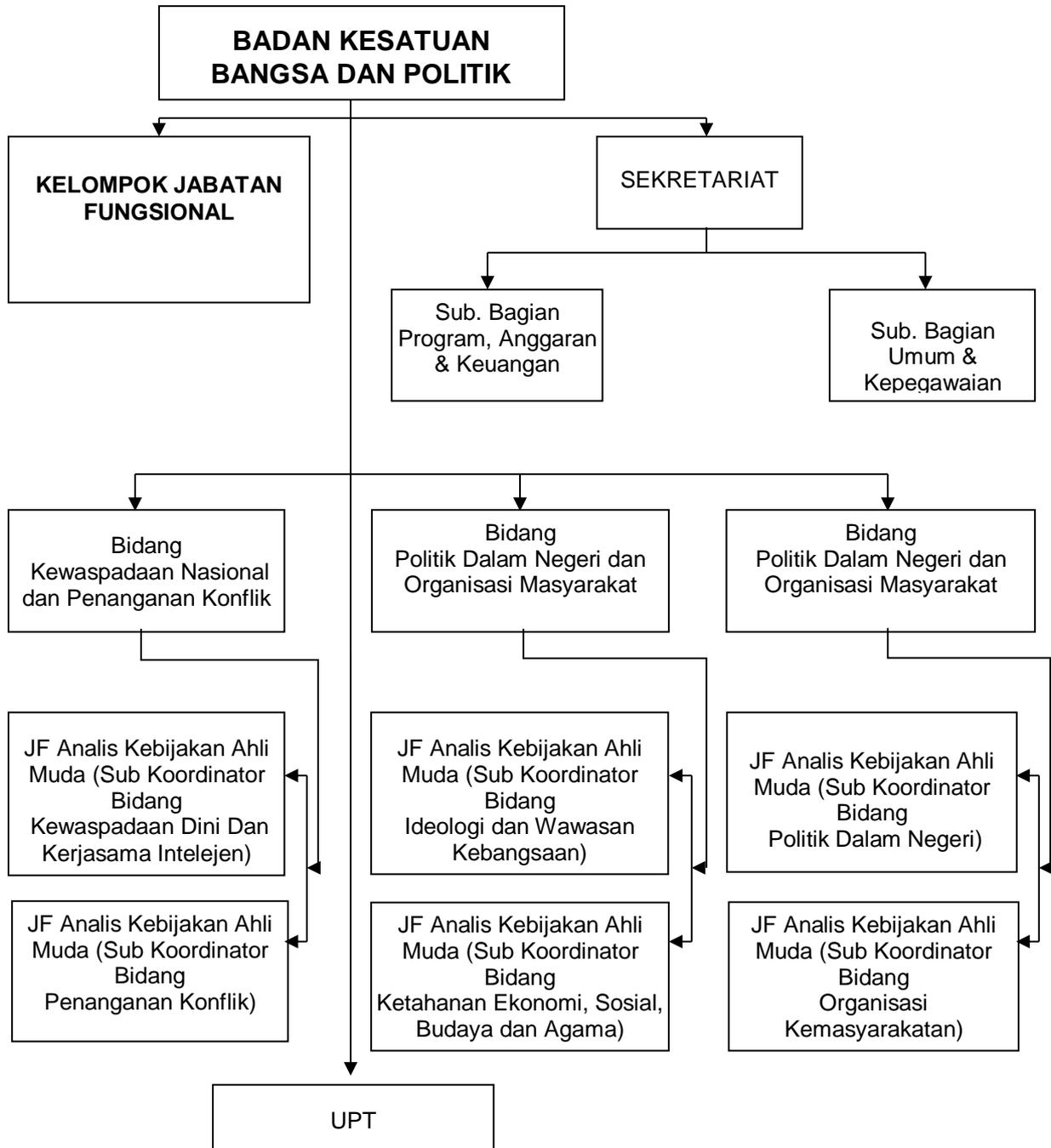
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan



c. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	7
5.	Staf	5
6.	Non PNS	33
	JUMLAH	49

Tabel 1.2
SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV		
1.	S-3	-	-	-	-	-
2.	S-2	-	2	2	-	4
3.	S-1	-	2	5	2	9
4.	SM / D-3	-	-	-	-	-
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	2	2
7.	SLTP	-	-	-	1	1
8.	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	4	7	5	16

Tabel 1.3
PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	12
2.	Perempuan	4
JUMLAH		16

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebanyak 19 buah yang terdiri dari

Mobil Dinas : 3 buah

Sepeda Motor Dinas : 15 buah

2. Komputer, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah 18 buah dan 16 buah laptop. Disamping komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah LCD dan 1 buah kamera digital.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2022
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan



BAB II RENCANA KINERJA

- A. Renstra
- B. Rencana Kerja
- C. Indikator Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja



PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Visi Misi Kabupaten Balangan pada RPJMD 2021 - 2026 adalah

VISI :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan

langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan serta Pariwisata Kreatif;
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

Adapun keterkaitan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD 2021- 2026 dan Renstra 2021-2026

RPJMD Kabupaten Balangan	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Visi	Tujuan
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat
Misi 5	Sasaran
Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial 2. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Tujuan	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama Serta Pemerintahan Yang Harmonis Dan Kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan 2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) 3. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif
Sasaran	
Terjaganya Kehidupan Sosial Yang Kondusif	

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan Misi ke- 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif dengan tujuan Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif untuk mencapai sasaran Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.2
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara

Dalam mewujudkan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Balangan dengan indikator Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara , Indikator tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara yang dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah;

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan
2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)
3. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

Strategi yang diambil antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa program prioritas:

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Tabel 2.3
Matriks Renstra 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	Persentase Daerah Rawan Konflik yang	Jumlah Daerah Potensi	100	100	100	100	100	100

terhadap Konflik Sosial	Terpetakan	Konflik yang dipetakan / Jumlah Daerah Potensi Konflik x100%							
Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	Jumlah Tempat Ibadah/Jumlah Pendudukx10.000	45	47	50	53	55	60	
	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Jumlah Ormas yang Aktif /Jumlah Ormas yang terdaftar (diakui) x100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah Parpol yang Aktif /Jumlah Parpol yang terdaftar (diakui) x100	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel matriks renstra 2021-2026, dapat diketahui bahwa target Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa yaitu:

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan
2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)
3. Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, dengan tujuan Terwujudnya Kerukunan dan

Toleransi dalam Masyarakat untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tabel 2.4
Perencanaan Kinerja tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022
Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100
		Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	47
			Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	100

Dari tabel diatas perencanaan kinerja tahun 2022, Target kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan sebanyak 100%, Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) sebanyak 47 tempat ibadah dan Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif ditargetkan 100%.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah pada tahun 2022 sesuai dengan Renja Perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 7.740.206.950,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.608.509.207,- dari APBD murni tahun 2022 Dari anggaran tersebut mendanai beberapa program:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen RKA Badan Kesbangpol.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen DPA Badan Kesbangpol
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang – undangan.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan indikator kinerja Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Persentase laporan keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator kinerja Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell).
- 2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang, dengan indikator kinerja Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan (paket).
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator kinerja Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai kesbangpol Kab. Balangan
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator kinerja Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik, dengan indikator kinerja Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah waktu perbaikan peralatan kerja (bulan).
- 4) Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor, dengan indikator kinerja waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan indikator kinerja Persentase Kendaraan Dinas Operasional layak Fungsi.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan dan Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan.
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Pendidikan Politik dan Jumlah pembinaan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan, Jumlah pembinaan/pengawasan bantuan dana partai politik, Jumlah koordinasi pelaksanaan pemilu.

- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan Partai Politik.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
- 2) Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Ormas yang dibina melalui monev.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan

Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan).

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB.

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator Persentase rekomendasi SKP yang diterbitkan
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, dengan indikator kinerja Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi ; Jumlah Fasilitasi FKDM.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah rapat koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial.

- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi Forkopimda

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun 2021-2026 dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Eselon II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target 2022
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan/ Jumlah Daerah Potensi Konflik X100	100
Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)	Jumlah Tempat Ibadah / Jumlah Penduduk X10.000	47
	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Jumlah Ormas yang Aktif / Jumlah Ormas terdaftar/diakui X100	100
		Jumlah Parpol yang Aktif / Jumlah Parpol terdaftar/diakui X100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun 2021-2026 yaitu :

1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan untuk mencapai

sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial.

2. Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) dan Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

D. Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kepala Badan

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 penduduk)	47	47	
		Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	100%	100%	

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Sekretaris

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	64,60	64,60	

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik dan partisipasi ormas dalam pembangunan Kabupaten Balangan	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	
		Persentase Parpol yang Aktif	100%	100%	

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta terjaganya kerukunan umat beragama	Persentase Ormas Keagamaan yang aktif	100%	100%	
		Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	100%	

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan jasa perawatan jaringan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer dan Perlengkapan computer yang diadakan, jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (paket)	1 paket	5 Paket	4 Paket
3.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai badan kesbangpol kab.Balangan (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
4.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
6.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
7.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu perbaikan peralatan kerja (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
8.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor, jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang terbayarkan (bulan)	12 bulan	12 Bulan	
9.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jumlah bulan pelaksanaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12 bulan	12 Bulan	

	atau Bangunan Lainnya				
10	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya, pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 Bulan	
11	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah (op)	12 bulan	12 Bulan	
12	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 OP	10 OP	8 OP
13	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas atribut kelengkapan	17 stell	100 Stell	83 Stell

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku	100%	100%	

4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan semesteran (laporan)	100%	100%	

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Politik Dalam Negeri)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	9 Laporan	9 Laporan	
3	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	merumuskan kebijakan			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100%	100%	
2	Terlaksananya monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui monev	5 Ormas	5 Ormas	

Tabel 2.15
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitas pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB 1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------	------------	--

Tabel 2.16
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan)

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

Tabel 2.17
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda
(Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik)

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	100%	100%	
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	4 Kegiatan	4 Kegiatan	

	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah			
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
4	Terlaksananya Forum Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Forkopimda	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan



BAB III AKUNTABILITAS KERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Kinerja Lainnya



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran

strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Kinerja
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan strategis yang pada tahun keduanya telah berhasil mencapai tujuan yaitu:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN S/D 2022
Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat	Angka Konflik Sosial yang Bernuansa SARA	0	0	0	100%

Capaian Indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan “Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara” adalah 100%, hal ini dikarenakan tidak ada konflik yang terjadi sampai tahun 2022. Untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi

dalam masyarakat, didukung oleh program yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa dan Politik yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Adapun hasil Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial						
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan		100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
2	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)		47	44	94%	Sangat Tinggi
3	Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Parpol yang Aktif	100%	100	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian					98,50%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa semua Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022, secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 98,50% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dengan capaian rata-rata $\geq 98,50\%$ dengan katagori Sangat Tinggi, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan capaian rata-rata $\geq 93,50\%$ maka terjadi peningkatan sasaran kinerja sebesar 5 %

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan” pada tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di targetkan 100 %, dimana pada tahun 2022 ini terdapat kejadian yang berpotensi menjadi konflik sosial sebanyak 5 kasus di 8 Kecamatan, Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 8 Daerah potensi konflik dan jumlah Daerah potensi konflik sendiri berjumlah 8

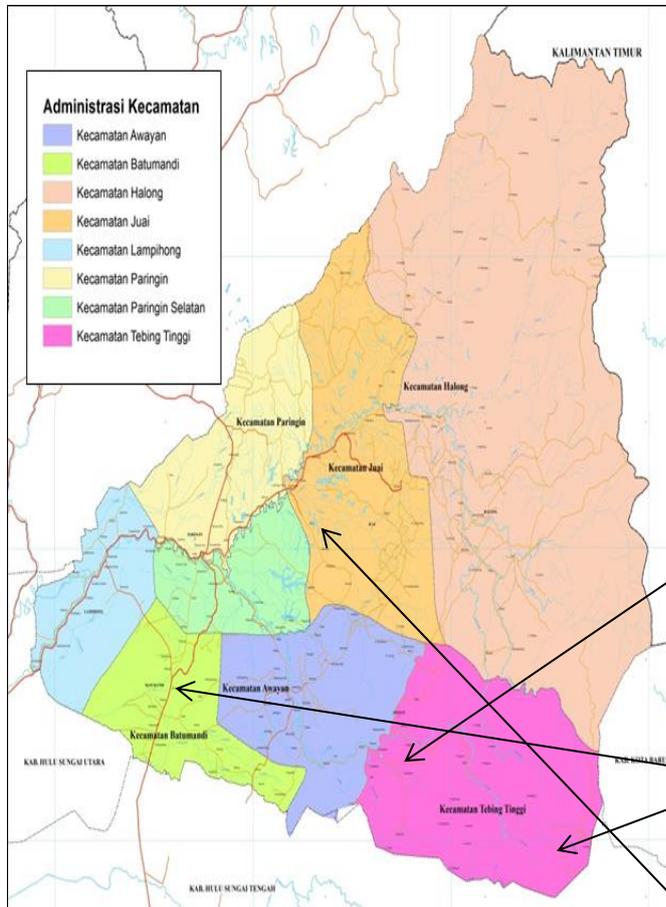
Kecamatan dan 5 Kasus potensi konflik sosial yang terindikasi dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat semuanya sudah ditangani dan tidak menimbulkan konflik. Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang dipetakan ini didapat dari pengukuran berikut:

Formulasi perhitungan Persentase Daerah Rawan Konflik yang dipetakan		
Persentase Daerah Rawan Konflik =	$\frac{\text{Jumlah Daerah Potensi Konflik yang dipetakan}}{\text{Jumlah Daerah Potensi Konflik}}$	X 100
100% =	$\frac{8 \text{ Kecamatan}}{8 \text{ Kecamatan}}$	X 100

Adapun capaian tersebut disupport oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial didaerah melalui koordinasi tim terpadu penanganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forkopimda dan Tim Puskominfo, semua tim tersebut terdiri dari Pemerintah Kabupaten Balangan, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, BPN, Kemenag, BAIS dan BIN yang menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik didaerah dan melakukan penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

HASIL PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022



Potensi Konflik Politik/Hukum/Pemerintahan

1. Kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Layap Kelurahan Paringin Kota

Potensi Konflik Sosial

1. Kasus banjir rendam Desa Kaladan, Kecamatan Batumandi dan Desa Sei Batung, Kecamatan Juai
2. Kasus Penebangan dan perusakan kebun karet milik warga Desa Auh oleh warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi
3. Adanya tambang ilegal di Desa Guha Kecamatan batumandi dan Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi
4. Kasus Permasalahan Sengketa Tanah Yang Terletak di Desa Sungai Batung dan Desa Tawahan , Kecamatan Juai

Nb :

- Kecamatan Tebing Tinggi
- Kecamatan Lamphong
- Kecamatan Halong
- Kecamatan Paringin Selatan
- Kecamatan Aawayan
- Kecamatan Paringin
- Kecamatan Batumandi
- Kecamatan Juai

Dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan , yang ditargetkan 8 Kecamatan, realisasi keseluruhannya dapat dipetakan, sehingga capaian Indikator kinerja “Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan” tercapai 100%, dengan terdapatnya 5 (Lima) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik politik dan potensi konflik sosial budaya seperti yang digambarkan

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian Indikator sasaran “Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan”, diantaranya ada faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Faktor Internal :

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan secara aturan dengan :
 - ❖ Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/326/Kum Tahun 2022 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2022.
 - ❖ Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/327/Kum Tahun 2022 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
 - ❖ Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/347/Kum Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan dini Kabupaten Balangan Tahun 2022.
 - ❖ Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/529/Kum Tahun 2022 Tentang Forum Kewaspadaan dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- Adanya dukungan APBD Murni Tahun 2022 dan APBD Perubahan Tahun 2022.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Faktor Eksternal :

- Terjalannya kerjasama yang baik dan berkesinambungan dari instansi vertikal sebagai mitra dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam koordinasinya untuk membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan potensi konflik yang akan ataupun yang sudah terjadi dalam tahun 2022.
- Peran serta masyarakat dalam hal lapor cepat kepada Tim Koordinasi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik daerah terhadap permasalahan, baik yang menyangkut potensi-potensi permasalahan yang berkembang dilingkungannya sehingga akan menimbulkan konflik yang akan meluas.
- Terjalannya koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan maupun penyampaian laporan hasil kegiatan tersebut.

Dalam proses pencapaian indikator kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan, diantaranya ada faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja tersebut yaitu belum optimalnya sinkronisasi data intelijen dan Masyarakat tentang potensi konflik sampai tingkat desa yang menjadi sumber data pemetaan Daerah Rawan Konflik. Adapun strategi untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Menjalankan Operasi Aplikasi SIKANDA sebagai Bank data Kewaspadaan terhadap Potensi Konflik di wilayah Kabupaten Balangan.
2. Perlu ditingkatkan lagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa sebagai early warning terhadap kejadian/ peristiwa yang akan menimbulkan potensi konflik
3. Perlu di tingkatkan lagi kegiatan Timdu PKS untuk kedepannya dalam hal lebih memfokuskan rencana aksinya sesuai dengan tupoksi instansi nya masing-masing.
4. Koordinasi lebih intens dengan Provinsi/ Pusat untuk bisa menjadi mitra dalam kegiatan tersebut sehingga terjalinnya sinkronisasi update data Kewaspadaan/Deteksi Dini serta potensi-potensi konflik dan penyusunan rencana aksi daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi/ pusat.

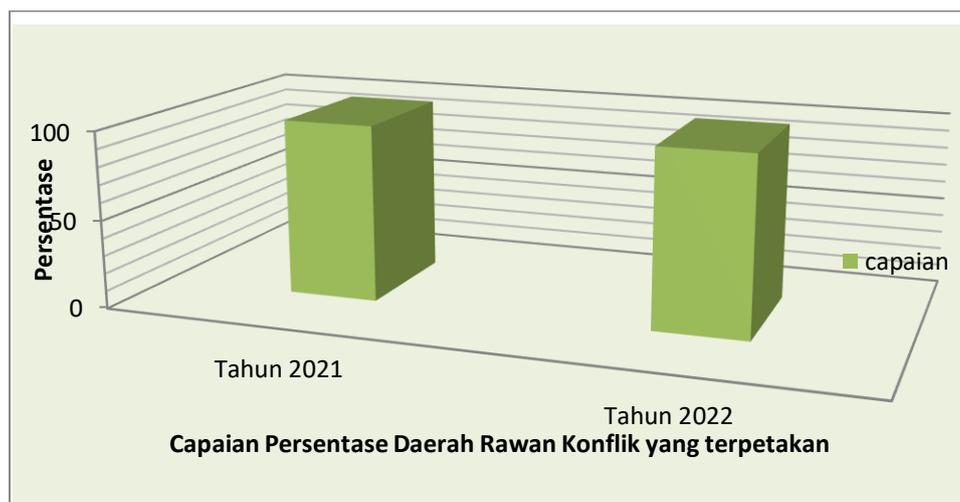
Perbandingan capaian Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Skor Persentase Daerah Rawan Konflik yang terpetakan

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan di tahun 2022 sama halnya dengan capaian kinerja di tahun 2021 dari hasil pemetaan terhadap Daerah Rawan Konflik sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan, yang ditargetkan 8 Kecamatan, realisasi keseluruhannya dapat dipetakan.

Grafik Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan



Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)		47	44	94%
Persentase Ormas dan Parpol yang Aktif	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	100%
	Persentase Parpol yang Aktif	100%	100%	100%
RATA- RATA CAPAIAN				98%

1. Rasio Tempat Ibadah

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk)” pada tahun 2022 sebesar 94% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dimana Rasio tempat ibadah yang ditargetkan pada tahun ini sebanyak 47

tempat ibadah sedangkan realisasinya sebanyak 44 tempat ibadah untuk 10.000 penduduk ditahun 2022 atau sebanyak 579 tempat ibadah berdiri di Kabupaten Balangan.

TABEL 3.3
Rekap Data tempat Ibadah di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Tempat Ibadah Menurut Agama				Jumlah
		Mesjid / Mushalla	Gereja / Kapel	Vihara / Cetiya	Pura	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tebing Tinggi	20				20
2	Halong	69	12	16	1	98
3	Awayan	36				36
4	Juai	100				100
5	Lampihong	77				77
6	Batumandi	73				73
7	Paringin	129				129
8	Paringin Selatan	45	1			46
Jumlah		549	13	16	1	579

Sumber : FKUB Kabupaten Balangan

Realisasi Rasio Tempat Ibadah di dapat dari Formulasi Perhitungan		
Rasio Tempat Ibadah =	$\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk Balangan}}$	X 10.000
44 =	$\frac{579}{132.643}$	X 10.000

Capaian kinerja untuk indikator Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk dengan realisasi sebesar 44 tempat ibadah per 10.000 jumlah

penduduk tidak sesuai dengan target sebesar 47 tempat ibadah dalam 10.000 jumlah penduduk, hal ini terjadi antara lain karena :

- Jumlah penduduk menurut penganut agama selain Islam cukup rendah di Kabupaten Balangan yaitu 8.237 jiwa (6,20%) dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan yaitu sebesar 132.643 jiwa di Kabupaten Balangan sehingga ketika ingin mendirikan rumah ibadah sering kali terkendala dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 yaitu :
 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/kota.
 4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini adalah:

1. Koordinasi dengan lintas sektor berjalan baik, terutama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan.
2. Kesadaran masyarakat penganut agama di Kabupaten Balangan yang cukup tinggi tentang pentingnya pendirian rumah ibadah sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Kerukunan umat beragama yang terbina dengan baik di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik Agama terutama dalam hal pendirian tempat ibadah.

Permasalahan dan hambatan yang biasanya muncul dari pencapaian indikator antara lain:

1. Persyaratan Administrasi yang cukup banyak harus dipenuhi oleh penganut agama untuk kelengkapan pendirian tempat ibadah terutama untuk penganut agama minoritas disuatu daerah.
2. Biaya untuk pendirian tempat ibadah cukup besar sehingga sering kali

terkendala dalam masalah pendanaan yang tidak mencukupi untuk pembangunan tempat ibadah.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pedoman pendirian rumah ibadah.
2. Perlunya gotong royong dan kebersamaan sesama penganut agama dalam pendirian tempat ibadah terutama dalam masalah pendanaan agar bisa berjalan sesuai harapan.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan.

Perbandingan Capaian Rasio Tempat Ibadah tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skor Rasio Tempat Ibadah

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
47	44	94%	42	93%	60	73%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 93% yaitu 42 tempat ibadah per 10.000 penduduk untuk capaian tahun ini mengalami peningkatan menjadi 94% yaitu 44 tempat ibadah per 10.000 penduduk. Dimana untuk tahun 2021 ada 553 tempat ibadah yang ada, sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 579 tempat ibadah atau sebanyak 26 tempat ibadah baru berdiri selama kurun waktu tahun 2022 di Kabupaten Balangan.

Grafik Capaian Rasio Tempat Ibadah



2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik yang Aktif.

a. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.

Capaian Kinerja dari “Persentase Ormas yang aktif” sebesar 100% dengan Kategori Capaian Sangat Tinggi.

Adapun Ormas yang dimaksud dalam indikator ini adalah Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Hukum dan Ham. Ormas di kabupaten Balangan yang terdaftar ataupun diakui oleh Kementerian adalah berjumlah sebanyak 28 Ormas.

Tabel 3.5

Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kemendagri dan KemenKumHam

NO	NAMA ORMAS	TERDAFTAR
1.	GERAKAN PUTERA ASLI KALIMANTAN	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
2.	YAYASAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BALANGAN	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
3.	HIMPUNAN PEDAGANG PASAR MODERN BALANGAN "TAMARA"	Terdaftar di Kementerian

4.	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT "RINDANG HIJAU LESTARI"	Terdaftar di Kementerian
5.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " BERSAMA BANGUN BANUA"	Terdaftar di Kementerian
6.	BADAN PEMADAM KEBAKARAN PUTERA 19	Terdaftar di Kementerian
7.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LSM LIRA)	Terdaftar di Kementerian
8.	LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-KPK)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
9.	LEMBAGA ADAT SUKU DAYAK MERATUS	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
10.	PIMPINAN DAERAH PERSAUDARAAN MUSLIMAH (PD SALIMAH)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
11.	YAYASAN "AL-HIKMAH HAMARUNG"	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
12.	FEDERASI OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (FORMI)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
13.	Persatuan Terapis Gigi dan mulut (PTGMI)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
14.	Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
15.	Damkar Pulau Baruh Beredar	Terdaftar di Kementerian
16.	Yayasan Pondok Pesantren Darur Abrar Al Hasaniyyah	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
17.	Barisan Pemuda Nusantara (BAPERAN)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
18.	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
19.	YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA (YDII)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
20.	BADAN PEMADAM KEBAKARAN PULANTAN PUTIH (BPK PULANTAN PUTIH)	Terdaftar di Kementerian

21.	FORUM PEMUDA DAYAK (FORDAYAK)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
22.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
23.	YAYASAN RAUDHATUL JANNAH AL KHAIR	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
24.	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN RELAWAN JAGOR	Terdaftar di Kementerian
25.	BADAN PEMADAM KEBAKARAN RICA HAUR BATU	Terdaftar di Kementerian
26.	LEMBAGA BADAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK) TAP TIGA BENUA	Terdaftar di Kementerian
27.	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK) BATU PIRING	Terdaftar di Kementerian
28.	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN BIHARA NUNGKA BATUAH	Terdaftar di Kementerian

Dari tabel diatas bahwa ormas yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Balangan yang terdaftar dan mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Realisasi Persentase Ormas yang aktif di dapat dari Formulasi Perhitungan		
Persentase Ormas Aktif =	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar/diakui}}$	X 100
100 % =	$\frac{28 \text{ Ormas}}{28 \text{ Ormas}}$	X 100

Dari Formulasi perhitungan di atas capaian Indikator Kinerja dari Persentase Ormas Aktif sebesar 100%.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini adalah:

1. Koordinasi dengan Pihak Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan berjalan dengan baik.
2. Tercapainya Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di rekomendasikan untuk mendapatkan SKT.
3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Permasalahan dan hambatan yang biasanya muncul dari pencapaian indikator antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dari Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tentang kewajiban Organisasi untuk menyampaikan Laporan Kegiatan/Perkembangan Organisasi.
2. Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyatakatan masih belum optimal dikarenakan terkendala Jarak dan medan yang di lalui untuk mencapai Sekretariat Organisasi Kemasyaakaan.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan adalah:

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi tentang Keormasan.

Perbandingan capaian Persentase Ormas yang aktif tahun 2022 dengan capaian tahun 2021, dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Skor Persentase Ormas yang Aktif

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sama halnya sebesar 100% . Dimana untuk tahun 2021 ada Ormas yang aktif di Kabupaten

Balangan berjumlah 18 (delapan belas) Ormas dari seluruh Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkum HAM sebanyak 18 (delapan belas) Ormas, sedangkan untuk tahun 2022 ormas yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Balangan yang terdaftar dan mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti selama kurun waktu satu tahun ada kenaikan 10 ormas dari 18 ormas yang terdaftar di tahun 2021 menjadi 28 Ormas yang telah terdaftar di tahun 2022.



b. Persentase Partai Politik yang Aktif.

Capaian Kinerja dari “Persentase Partai Politik yang Aktif” sebesar 100 % dengan Kategori Capaian Sangat Tinggi, Adapun partai politik yang dimaksud dalam indikator ini adalah Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang berjumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Partai Politik.

Tabel 3.7
Data Jumlah Partai Politik di Kabupaten Balangan

No	Nama Partai Politik	Kode	Status	Keterangan
1	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
2	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik

3	PARTAI BERKARYA	A	Aktif	<i>SK Kepengurusan Ada Perubahan tapi masih di Pusat</i>
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
5	PARTAI DEMOKRAT	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
6	PARTAI ERA MASYARAKAT SEJAHTERA (EMAS)	A	Aktif	
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
8	PARTAI GELOMBANG RAKYAT (GELORA)	A	Aktif	
9	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	A	Aktif	Kepengurusan di Serahkan ke Pusat (Provinsi)
11	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
12	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	A	Aktif	
13	PARTAI NASDEM (NASIONAL DEMOKRAT)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
14	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	A	Aktif	Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Bantuan Keuangan Partai Politik
15	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	A	Aktif	
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	A	Aktif	
17	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	A	Aktif	
18	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	A	Aktif	
19	PARTAI UMMAT	A	Aktif	
20	PARTAI MASYUMI	A	Aktif	
21	PARTAI PEMERSATU BANGSA	A	Aktif	
22	PARTAI BURUH	A	Aktif	
JUMLAH AKTIF				22

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berjumlah 22 Parpol, terdiri dari partai politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan dari hasil Pemilu tahun 2019 yang berjumlah 9 Partai Politik dan partai politik yang tidak mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Balangan tapi berstatus Aktif.

Realisasi Persentase Parpol yang aktif di dapat dari Formulasi Perhitungan		
Persentase Parpol Yang Aktif =	$\frac{\text{Jumlah Parpol Aktif}}{\text{Jumlah Parpol yang terdaftar/diakui}}$	X 100
100 % =	$\frac{22 \text{ Parpol}}{22 \text{ Parpol}}$	X 100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari capaian Indikator ini adalah :

1. Koordinasi dengan Partai Politik berjalan baik
2. Terlaksananya Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadap Partai Politik.

Permasalahan dan Hambatan yang Biasanya muncul dari pencapaian indikator antara lain:

1. Terlambatnya Partai Politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol;
2. Pelaksanaan system Pelaporan Parpol secara Berkala;

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan kepada Partai Politik adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev kepada Partai Politik secara berkala;
2. Mengoptimalkan system pelaporan terhadap Parpol.

Perbandingan Capaian Persentase Parpol yang aktif tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 dan target ditahun akhir Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Skor Persentase Parpol yang Aktif

2022			2021		Target 2026 (Akhir Renstra)	Capaian terhadap akhir Renstra
Target	Realisasi	Capain	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	81%	81%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan dari 81% Parpol yang aktif menjadi 100% Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan . Dimana untuk tahun 2021 Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 17 (tujuh belas) Parpol dari 21 (dua puluh satu) Parpol yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan untuk tahun 2022 Parpol yang aktif di Kabupaten Balangan berjumlah 22 (dua puluh dua) Parpol yang aktif dari 22 (dua puluh dua) parpol yang terdaftar di Kabupaten Balangan.

Dari formulasi diatas dapat diketahui capaian kinerja Indikator Persentase Parpol yang aktif adalah 100% dan digambarkan dalam grafik Berikut.



Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Badan (Esselon II) didukung dengan adanya pencapaian kinerja dari IKU Esselon III. IKU Esselon III inilah yang menjawab dari hasil pencapaian kinerja Program.

Sasaran IK Eselon III (Sekretaris)	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

INDIKATOR	2021	2022		Capaian 2022 thdp 2026	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	100%	64,60	67,93	105%	100,64%

Sekretariat dimana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 dimana Laporan Kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Balangan adalah Laporan Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 67,93 dengan kategori **B** atau **Baik**. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 105% dengan target nilai B (64,60) dan terealisasi dengan nilai B (67,93).

Dibandingkan dengan capaian kinerja sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari 100% menjadi 105%, hal ini dikarenakan kenaikan Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formulasi Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan



Sasaran IK Eselon III (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)	Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

INDIKATOR	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan Indikator kinerja “Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti” tercapai 100%, dengan terdapatnya 5 (Lima) potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik politik dan potensi konflik sosial budaya, yang seluruh potensi konflik tersebut sudah ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yang sama halnya tercapai 100% dengan terdapatnya 6 potensi konflik yang terdiri dari potensi konflik ekonomi, potensi konflik politik dan potensi konflik social budaya, yang semua potensi konflik sudah ditindaklanjuti.

Sasaran IK Eselon III (Kabid Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIKATOR	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dengan indikator kinerja :

1. Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan jumlah ormas keagamaan yang aktif dikabupaten Balangan sebanyak 5 ormas keagamaan dari jumlah ormas keagamaan yang melapor, terdaftar dan berbadan hukum sebanyak 5 ormas keagamaan.

Tabel 3.9
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Yang Melapor,
Terdaftar Dan Berbadan Hukum

NO	NAMA ORMAS	BIDANG KEGIATAN	NO SK /BADAN HUKUM	KETERANGAN STATUS BADAN HUKUM
1	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Balangan	Keagamaan	AHU - 2339.AH.01.04. Tahun 2013	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
2	Yayasan "Al-Hikmah Hamarung"	Keagamaan	AHU- 0013087.AH.01. 04 Tahun 2017	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
3	Yayasan Pondok Pesantren Darur Abrar Al Hasaniyyah	Keagamaan	AHU- 0011673.AH.01. 04	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
4	Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (YDII)	Keagamaan	AHU-AH.01.06- 0020247	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

5	Yayasan Raudhatul Jannah Al Khair	Keagamaan	AHU-0002963.AH,01,04 Tahun 2022	Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
---	-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------------------------------------

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2021 sama halnya memperoleh capaian 100% dengan jumlah ormas keagamaan yang aktif sebanyak 4 ormas keagamaan yang aktif dari jumlah ormas keagamaan yang melapor, terdaftar dan berbadan hukum sebanyak 4 ormas keagamaan.

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\text{Jumlah Ormas Keagamaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Keagamaan yang terdaftar}} \times 100$	



2. Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat memperoleh capaian 100% dengan jumlah kelompok masyarakat yang aktif sebanyak 6 kelompok masyarakat dari 6 kelompok masyarakat yang berada dibawah Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Balangan.

Tabel 3.10
Daftar Kelompok Masyarakat Yang Berada Di Bawah Forum Pembauran Kebangsaan

NO	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT	BIDANG KEGIATAN	ALAMAT	STATUS
1	LEMBAGA BALAI ADAT KINAKAN	Kelembagaan Adat	Desa Mamigang RT. 05 Kecamatan Halong	Aktif

			Kab. Balangan	
2	LEMBAGA BALAI ADAT SANGKAR MANYURUNG	Kelembagaan Adat	Desa Uren RT. 01 Kecamatan Halong Kab. Balangan	Aktif
3	LEMBAGA BALAI ADAT MUARA AMBATA	Kelembagaan Adat	Desa Uren RT. 05 Kecamatan Halong Kab. Balangan	Aktif
4	LEMBAGA BALAI ADAT LIBARU SINGKAI	Kelembagaan Adat	Jln. Rintisan RT.03 Desa Binuang Santang Kec. Halong Kab. Balangan	Aktif
5	LEMBAGA ADAT SUKU DAYAK MERATUS	Kelembagaan Adat	Jl. Belimbing RT. 03 Desa Tabuan Kec. Halong	Aktif
6	LEMBAGA ADAT SUKU DAYAK BALANGAN	Kelembagaan Adat	Desa Kapul Kec. Halong Kab. Balangan	Aktif

Perbandingan capaian Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat tahun 2022 dengan tahun 2021 sama halnya memperoleh capaian 100% dengan jumlah kelompok masyarakat yang aktif sebanyak 6 kelompok masyarakat dari 6 kelompok masyarakat yang berada dibawah forum Pembauran Kebangsaan

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang Aktif}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang ada diFPK}} \times 100$	



Sasaran IK Eselon III (Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan)	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Politik dan Partisipasi Ormas dalam Pembangunan Kabupaten Balangan
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIKATOR	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Parpol yang Aktif	81%	100%	100%	100%	100%
Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase Parpol yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan jumlah parpol yang aktif sebanyak 22 parpol dari jumlah parpol sebanyak 22 parpol yang terdaftar di Kabupaten Balangan
Perbandingan capaian persentase Parpol yang aktif di tahun 2021 sejumlah 81% dengan jumlah parpol yang aktif sebanyak 17 Parpol dari 21 parpol yang terdaftar di Kabupaten Balangan

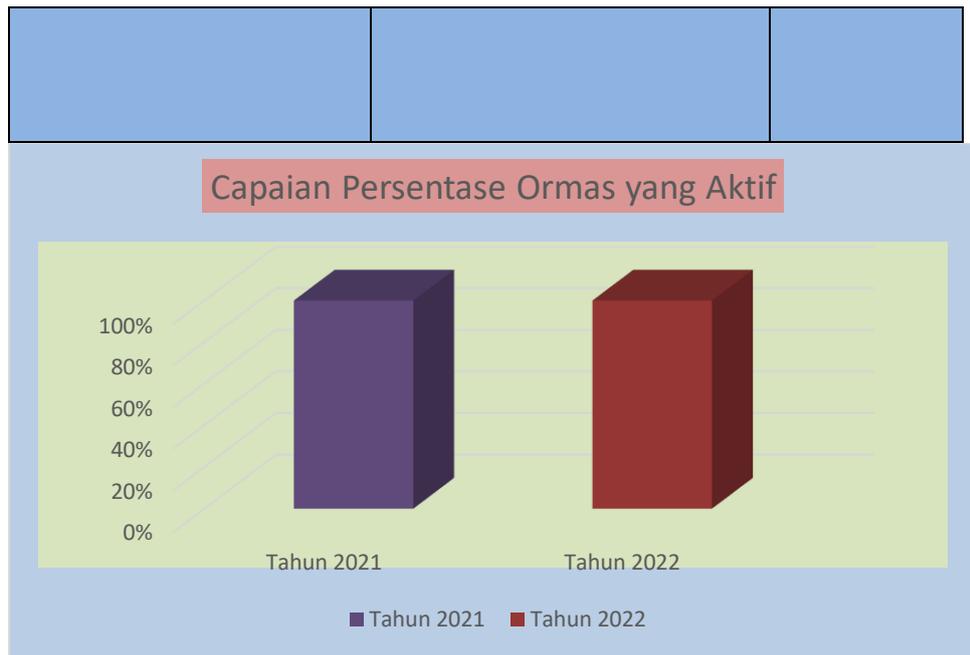
Realisasi Persentase Parpol yang aktif di dapat dari Formulasi Perhitungan		
Persentase Parpol Yang Aktif =	$\frac{\text{Jumlah Parpol Aktif}}{\text{Jumlah Parpol yang terdaftar/diakui}}$	X 100



2. Persentase Ormas yang Aktif memperoleh capaian 100% dengan jumlah ormas yang aktif tahun 2022 sebanyak berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) Organisasi Kemasyarakatan dari 28 ormas yang terdaftar di Kabupaten Balangan dan mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbandingan capaian dengan tahun 2021 sama halnya meperoleh capaian 100% dengan jumlah ormas yang aktif sebanyak 18 ormas dari 18 ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkum HAM.

Realisasi Persentase Ormas yang aktif di dapat dari Formulasi Perhitungan		
Persentase Ormas Aktif =	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar/diakui}}$	X 100



Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja eselon III rata-rata sangat tinggi, capaian tersebut diatas disupport oleh semua program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang berjumlah 5 (lima) Program ditambah dengan 1(satu) Program penunjang yaitu program sekretariat.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Eselon IV / Jf Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kinerja	Indikator	2021	2022		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	100%	2	2	100%
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2	2	100%
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang undangan yang	100%	100%	100%	100%

		berlaku				
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan semesteran (laporan)	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100	98	98%
7	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	10	10	100%
8	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	12	12	100%
9	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah komputer dan perlengkapan komputer yang diadakan, jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	100%	5	5	100%
10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	12	12	100%
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	100%	12	12	100%
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	100%	12	12	100%

14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12	12	100%
15	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu perbaikan peralatan kerja (bulan)	100%	12	12	100%
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	12	12	100%
17	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya, pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	100%	12	12	100%
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	12	12	100%
19	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah koordinasi gugus tugas GNRM yang dilaksanakan	100%	1 Keg	1 Keg	100%
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan	100%	2 Keg	2 Keg	100%
20	Terlaksananya Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pendidikan Politik	100%	2 Keg	2 Keg	100%
21	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan	100%	1 Keg	1 Keg	100%
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol	100%	9 laporan	9 laporan	100%

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
23	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100%	100%	100%	100%
24	Terlaksananya monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina melalui monev	100%	5 Ormas	5 Ormas	100%
25	Terlaksananya koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan)	100%	1 Keg	1 Keg	100%
26	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan FKUB	100%	1 Keg	1 Keg	100%
27	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Potensi konflik yang terawasi	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Fasilitasi FKDM	100%	4 Keg	4 Keg	100%

28	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	4 Keg	4 Keg	100%
30	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	100%	4 Keg	4 Keg	100%
31	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Forkopimda	-	7 Keg	7 Keg	100%

Dari tabel diatas, Capaian Kinerja Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikatakan **sangat tinggi** karena indikator kinerja seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebesar Rp 7.330.210.844,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 7.740.206.950,- atau terealisasi sebesar 94,70 %. Realisasi belanja daerah ini berasal dari Belanja Operasi yaitu:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	2.658.094.350,-	2.396.178.319,-	90,15

2.	Belanja Barang dan Jasa	2.679.462.600,-	2.539.946.525,-	94,79
3	Belanja Hibah	2.183.950.000,-	2.183.950.00,-	100
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.700.000,-	156.586.000,-	98,67
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000,-	53.550.000,-	89,25
	Total	7.740.206.950,-	7.330.210.844,-	94,70

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran

Sasaran	Indikator	Rata-rata Capaian % (Kinerja)	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial (91,88%)	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	1,101,510,600,-	1,012,043,597,-	91.88
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama (95,71 %)	Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 penduduk)	94%	88,041,000	84,766,500	96.28
	Persentase Ormas yang Aktif	100%	1,743,650,000	1,712,998,900	91,99%
	Persentase Parpol yang Aktif	100%	920,840,000	910,367,600	98.86
			3,854,041,600	3,720,176,597	94,75%

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama yaitu rata-rata penyerapan anggaran dari 3 indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu sebesar 95,71%. Sementara penyerapan anggaran yang lebih kecil pada sasaran Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial yaitu 91,88 %.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2022

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	% Kinerja	Pagu Perubahan	Realisasi	% Realisasi
SASARAN 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial					
A	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	1,101,510,600	1,012,043,597	91.88
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1,101,510,600	1,012,043,597	91.88
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	345,240,000	319,895,100	92.66
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	216,660,000	204,791,877	94.52
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	458,190,000	426,771,020	93.14

d	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,420,600	60,585,600	74.41
SASARAN 2 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama					
A	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.67
1	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.67
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	100%	1,581,630,000	1,576,380,800	99.08
B	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	920,840,000	910,367,600	98.86
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	100%	920,840,000	910,367,600	98.86
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	69,736,000	67,319,600	96.53
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	74,574,000	73,100,000	98.02
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan	100%	776,530,000	769,948,000	99.15

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	100%	162,020,000	136,618,100	84.32
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	162,020,000	136,618,100	84.32
a	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	100%	89,486,000	87,600,300	97.89
b	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	100%	72,534,000	49,017,800	67.58
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	88,041,000	84,766,500	96.28
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	88,041,000	84,766,500	96.28
a	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	100%	70,056,000	67,090,000	95.77
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	17,985,000	17,676,500	98.28

Tabel 3.15
Analisa Efektif dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Efektif/ Relevan	% Kinerja	% Realisasi	% Efisien
SASARAN 1 : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial					
A	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Relevan	100	91.88	8.12

1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Relevan	100	91.88	8.12
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Relevan	100	92.66	7.34
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Relevan	100	94.52	5.48
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Relevan	100	93.14	6.86
d	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	100	74.41	25.59
SASARAN 2 : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Serta Terjaganya Kerukunan Umat Beragama					
A	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Relevan	100	99.67	0.33
1	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Relevan	100	99.67	0.33
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Relevan	100	99.08	0.92
B	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Relevan	100	98.86	1.14
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Relevan	100	98.86	1.14
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Relevan	100	96.53	3.47

	fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Relevan	100	98.02	1.98
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Relevan	100	99.15	0.85
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Relevan	100	84.32	15.68
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Relevan	100	84.32	15.68
a	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Relevan	100	97.89	2.11
b	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Relevan	100	67.58	32.42
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Relevan	100	96.28	3.72
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Relevan	100	96.28	3.72
a	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Relevan	100	95.77	4.23
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Relevan	100	98.28	1.72

Efektif dan Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan tabel diatas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten semuanya Efektif / Relevan dan Penggunaan Anggaran rata-rata efisien karena rata-rata kinerja tercapai dengan sangat baik.

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

C. Analisis Kinerja Lainnya

1. Rencana Aksi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 memperoleh kategori B (Baik) atau nilai sebesar 67,93 dibandingkan dengan nilai tahun 2020 sebesar 62,56. Dalam hal ini ada kenaikan nilai akunakuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebesar 5,37.

Adapun rekomendasi dari Inspektorat agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam hal penyusunan anggaran;
- b. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
- c. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja, untuk menilai dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
- d. Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti secara tertulis untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- e. Hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Adapun rencana aksi perbaikan yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan sehingga dapat

dapat memenuhi kriteria sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengimplementasikannya pada Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV, JF Analis Kebijakan dan Pelaksana

- b. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Indikator Kinerja pejabat eselon III, Eselon IV, JF Analis Kebijakan dan pelaksana selalu dilakukan pengukuran pertriwulan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan pemberian piagam penghargaan dan punishment berupa teguran;
- c. Melakukan pemantauan Rencana Aksi dengan monitoring dan evaluasi Renja yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bappedalitbang dan Bagian Organisasi dengan melakukan pemantauan melalui google drive Pengukuran Kinerja dan aplikasi E Kino yang diisi oleh pejabat sampai tingkat pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Hasil evaluasi program yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituangkan secara tertulis pertriwulan melalui Hasil Pengukuran Kinerja dari tingkat Jabatan Pimpinan Pratama sampai dengan pelaksana untuk perbaikan dimasa mendatang.
- e. Hasil Evaluasi Rencana Aksi dibuktikan dengan langkah-langkah nyata yaitu dengan meningkatnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditahun 2022.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Upaya Perbaikan Kinerja



A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan disajikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan gambaran tentang pelaksanaan kinerja, serta anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Pada Periode Renstra Tahun 2021 -2026 telah ditetapkan indikator tujuan yang sama dengan RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya dengan Indikator tujuan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA. Capaian Indikator Tujuan pada awal tahun kedua periode renstra ini juga 100% dari target 0 Angka Konflik dengan realisasi 0 angka konflik. Hal ini dikarenakan potensi konflik yang muncul segera ditangani dan dilakukan pemetaan serta pengawasan terhadap daerah-daerah yang berpotensi konflik, dengan tujuan Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam Masyarakat.

Pencapaian tujuan ini disupport oleh program dan kegiatan serta subkegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai sasaran

1. Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Konflik Sosial dengan capaian indikator kinerja sangat tinggi yaitu 100%
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama dalam Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan capaian indikator kinerja sangat tinggi yaitu 98 %

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp, 7.740.206.950,- dengan realisasi anggaran sebesar RP. 7.330.210.844,- atau 94,70%

Adapun penghargaan yang diberikan terhadap Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan diberikan kepada Bapak Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Balangan.



2. Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Balangan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas bantuan dan kerjasama dalam Proses Pembangunan Markas Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru berupa Hibah Langsung Sumber APBD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.



B. Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.

Adapun upaya yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap partai politik dan

- organisasi kemasyarakatan
4. Mendorong Ormas yang belum terdaftar untuk memperoleh SKT dari Kemendagri / Kemenkum HAM
 5. Koordinasi sinergitas, kerjasama dengan lintas sektor baik dengan Forkopimda, FKUB, FPK maupun instansi lainnya.
 6. Memperkuat Rencana Aksi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Balangan
 7. Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dalam penentuan program prioritas yang akan dilaksanakan

Paringin, 01 Februari 2023
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S. Pd, MM
Pembina Tk. I / IVb
NIP.19670403 199403 1 015